

# **Rencana Strategis (Renstra)**

Kapanewon Dlingo

Tahun 2021-2026

---

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul adalah dokumen perencanaan Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul untuk periode lima tahun. Renstra disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2019, Renstra Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang bersifat indikatif dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib sesuai tugas dan fungsi Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunandaerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan di kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul untuk lima tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Kepala Daerah terpilih.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Renstra Kapanewon Dlingo Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017-2022 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu KLHS RPJMD Tahun 2021-2024 RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030.

Renstra Kapanewon Dlingo merupakan penjabaran teknis RPJMD Kabupaten Bantul yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan operasional yang disusun oleh Kapanewon Dlingo di bawah Koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Renstra PD memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan subkegiatan PD disertai dengan kerangka pendanaan selama lima tahun. Renstra PD kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kerja Anggaran PD (RKA-SKPD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana.

Pembentukan awal Kapanewon Dlingo berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta (Perda DIY) Nomor 1 tahun 1958 (1/1958) tentang: Perubahan Batas dan Nama Kapanewon-Kapanewon Dlingo, Gondowulung, dan Kotagede dalam Kabupaten Bantul, maka dibentuklah Kapanewon Dlingo yang terdiri dari 6 Kalurahan yaitu: Kalurahan Mangunan, Kalurahan Dlingo, Kalurahan Muntuk, Kalurahan Temuwuh, Kalurahan Jatimulyo, Kalurahan Terong.

Kapanewon Dlingo dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.

Penamaan kecamatan menjadi kapanewon merupakan amanat dari Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan dan Peraturan Gubernur daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 129 tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Kapanewon Dlingo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);

- g. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 14 Tahun 2005);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 4 Seri C);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6).
- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Renstra Kapanewon Dlingo Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program ,kegiatan dan subkegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi ,yang disusun berpedoman pada RPJMD. Adapun tujuan disusunnya Renstra Kapanewon Dlingo Tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA PD.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

#### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

3.5. Penentuan Isu – isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon, maka Kapanewon merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan. Kapanewon dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon se kabupaten Bantul. Kapanewon Dlingo menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemerintan Umum/ melaksanakan fungsi penunjang Fungsi Lainnya.

Kapanewon Dlingo dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon se kabupaten Bantul. Kapanewon Dlingo mempunyai tugas membantu bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kapanewon Dlingo menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

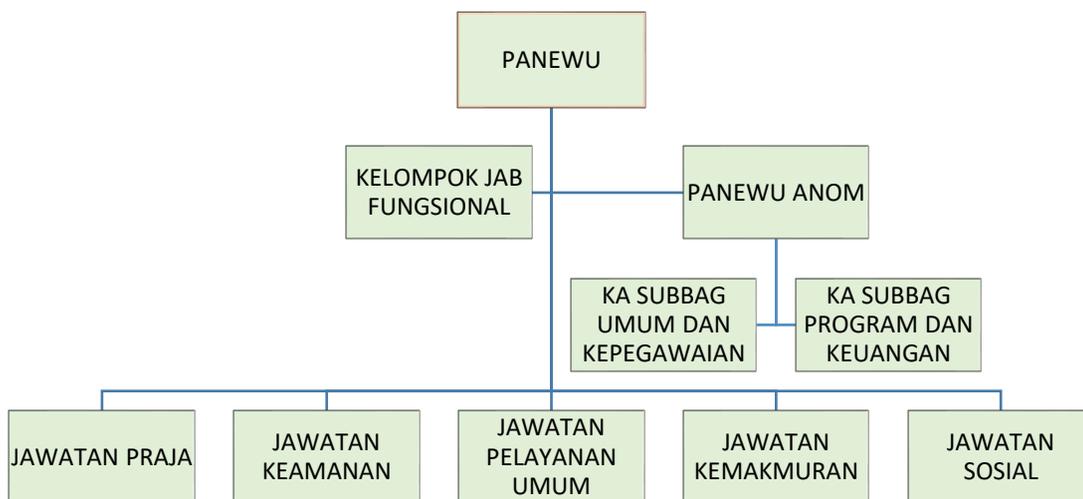
- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kapanewon;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa;
- h. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- i. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon dan;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Kapanewon Dlingo adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat;
- b. Jawatan Pemerintahan;
- c. Jawatan Ketenteraman dan Ketertiban;
- d. Jawatan Pelayanan;
- e. Jawatan Kemasyarakatan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan susunan organisasi Kapanewon Dlingo adalah sebagai berikut :



*Gambar 2.1. Bagan Susunan Organisasi Kapanewon Dlingo*

### **Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta mengoordinasikan

pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Kapanewon. Pelaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyusunan program kerja kapanewon;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan kapanewon;
- e. Pengelolaan keuangan kapanewon;
- f. Penyelenggaraan kepegawaian kapanewon;
- g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan kapanewon;
- h. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja kapanewon;
- j. Pelaksanaan program kesekretariatan;
- k. Pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan kalurahan;
- l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja sekretariat;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan

### **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
  - (a) Menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang,
  - (b) Kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan
  - (c) Ketatalaksanaan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- (a) Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;
- (b) Pengelolaan data kepegawaian kapanewon;
- (c) Penyiapan bahan mutasi pegawai kapanewon;
- (d) Penyiapan kesejahteraan pegawai kapanewon;
- (e) Penyelenggaraan kerumahtanggaan kapanewon;
- (f) Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
- (g) Pengelolaan barang milik daerah;
- (h) Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerjasama dan kehumasan ;
- (i) Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
- (j) Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
- (k) Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
- (l) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
- (m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Sub Bagian Program dan Keuangan**

- (1) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
- (2) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
  - (a) Penyusunan rencana kerja subbagian program dan keuangan;
  - (b) Penyusunan rencana program kapanewon;
  - (c) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis kapanewon;
  - (d) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran kapanewon;
  - (e) Penyiapan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi
  - (f) Pengelolaan keuangan kapanewon;
  - (g) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja kapanewon;
  - (h) Pengkoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistmewaan kalurahan;

- (i) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian program dan keuangan; dan
- (j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu anom sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Jawatan Praja**

- (1) Jawatan Praja dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat kapanewon.
- (3) Dalam melaksanakan tugas seksi pemerintahan mempunyai fungsi :
  - (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
  - (b) Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup kapanewon, meliputi :
    - i. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhinneka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia;
    - ii. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
    - iii. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
    - iv. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
    - v. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - vi. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila; dan

- vii. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal di tingkat kapanewon;
- (c) Penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- (d) Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal (spm) di wilayah kapanewon;
- (e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan forum koordinasi pimpinan di kapanewon, perangkat daerah dan instansi vertikal di tingkat kapanewon;
- (f) Pengkoordinasian administrasi pertanahan;
- (g) Pengkoordinasian administrasi kependudukan;
- (h) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur kalurahan, yang meliputi;
  - i. Fasilitasi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan;
  - ii. Fasilitasi penyusunan peraturan kalurahan;
  - iii. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kalurahan;
  - iv. Fasilitasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
  - v. Fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas kalurahan;
  - vi. Fasilitasi pengusulan pejabat lurah;
  - vii. Fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian lurah dan pamong kalurahan;
- (i) Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap lurah dan pamong kalurahan;
- (j) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
- (k) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kapanewon;
- (l) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah kapanewon;

- (m) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan praja; dan
- (n) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Jawatan Keamanan**

- (1) Jawatan Keamanan di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati di wilayah kapanewon.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jawatan keamanan mempunyai fungsi :
  - (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
  - (b) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - (c) Penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
  - (d) Penyiapan bahan dan sinergitas dengan satuan polisi pamong praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
  - (e) Pengkoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
  - (f) Pengkoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
  - (g) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - (h) Pelaksanaan pemantauan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - (i) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
  - (j) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan keamanan; dan
  - (k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Jawatan Pelayanan Umum**

- (1) Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.
- (2) Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kapanewon. Untuk melaksanakan tugas, jawatan pelayanan umum mempunyai fungsi :
  - (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
  - (b) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kapanewon;
  - (c) Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kapanewon;
  - (d) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat kapanewon;
  - (e) Pelaksanaan pelayanan publik di kapanewon;
  - (f) Pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di kapanewon;
  - (g) Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan;
  - (h) Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
  - (i) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di kapanewon dan kalurahan;
  - (j) Pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
  - (k) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kapanewon;
  - (l) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Umum;
  - (m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Jawatan Kemakmuran**

- (1) Jawatan Kemakmuran dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui Panewu Anom.
- (2) Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon.

(3) Untuk melaksanakan tugas , Jawatan Kemakmuran mempunyai fungsi :

- (a) penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
- (b) penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon;
- (c) pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kapanewon;
- (d) pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kalurahan;
- (e) penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kapanewon;
- (f) penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/ atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- (g) pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- (h) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kapanewon;
- (i) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat kapanewon;
- (j) pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan kemakmuran; dan
- (k) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya;

### **Jawatan Sosial**

(1) Jawatan Sosial dipimpin oleh kepala jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada panewu melalui panewu anom.

(2) Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi

terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat kapanewo

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), jawatan sosial mempunyai fungsi :

- (a) Penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
- (b) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
- (c) Pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat kapanewon;
- (d) Pengkoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
- (e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
- (f) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
- (g) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
- (h) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
- (i) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan jawatan sosial; dan
- (j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

### **2.2.1 Kondisi Kepegawaian**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kapanewon Dlingo dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumberdaya manusia, dan asset/modal berupa sarana prasarana penunjang. Pelaksanaan

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kapanewon Dlingo sesuai struktur organisasi terdiri dari Panewu selaku kepala/pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kapanewon. Panewu Anom selaku koordinator sekretariat Kapanewon, berada di bawah Panewu dan bertanggung jawab langsung kepada Panewu. Tugasnya membantu Panewu di bidang administrasi dan pelayanan umum. Disamping itu dalam menjalankan tugasnya, Panewu dibantu 5 kepala Jawatan sebagai pembantu dan pelaksana tugas Panewu sesuai bidangnya masing-masing serta 2 kepala sub bagian di sekretariat. Jumlah pegawai di Kapanewon Dlingo per April 2021 adalah 20 orang terdiri dari 2 orang pejabat eselon III, 6 orang pejabat eselon IV, dan 11 orang jabatan fungsional umum. ditampilkan dalam table sebagai berikut :

Tabel 2.2.1 Kondisi Jabatan

NO	JABATAN	Pendidikan	Keterangan
1	<b>Panewu</b>	<b>S1/S2</b>	<b>Terpenuhi</b>
2	<b>Panewu Anom</b>	<b>S1/S2</b>	<b>Terpenuhi</b>
3	<b>Ka jawatan Pelayanan Umum</b>	<b>S1</b>	<b>Terpenuhi</b>
4	Pengelola pelayanan	D3	Belum Terpenuhi
5	Tenaga Kontrak Pelayanan	S1	Terpenuhi
6	Tenaga Kontrak Pelayanan	S1	Terpenuhi
7	<b>Ka Jawatan Praja</b>	<b>S1</b>	<b>Terpenuhi</b>
8	Analisis pemerintahan	S1	Belum Terpenuhi
9	Pengadministrasi Umum/Bendahara gaji	SMA	Terpenuhi
10	<b>Ka Jawatan Kemakmuran</b>	<b>S1</b>	<b>Belum Terpenuhi</b>
11	Analisis Ekonomi Pembangunan	S1	Terpenuhi
12	Pengadministrasi Umum	SMA	Terpenuhi
13	<b>Ka Jawatan Sosial</b>	<b>S1</b>	<b>Terpenuhi</b>
14	Analisis Kemasyarakatan	S1	Terpenuhi
15	Pengadministrasi Umum	SMA	Terpenuhi
16	<b>Ka Jawatan Keamanan</b>	<b>S1</b>	<b>Terpenuhi</b>
17	Analisis Keamanan	S1	Terpenuhi
18	Pengadministrasi Umum/ Bendahara Barang	SMA	Terpenuhi
19	Tenaga Kontrak Penjaga Malam	SMA	Terpenuhi
20	Tenaga Kontrak Penjaga Malam	SMA	Terpenuhi
21	<b>Kasubag Program dan Keuangan</b>	<b>S1</b>	<b>Terpenuhi</b>
22	Pengadministrasi Umum/ Bendahara Keuangan	SMA	Terpenuhi
23	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	S1	Belum Terpenuhi
24	Ferifikator Keuangan	D3	Belum Terpenuhi
25	<b>Kasubag Umum</b>	<b>S1</b>	<b>Terpenuhi</b>
26	analisis SDM Aparatur	S1	Terpenuhi
27	Pengadministrasi Umum	SMA	Belum Terpenuhi
28	Pramu Bhakti/ Penyimpan Barang	SMP	Terpenuhi
29	Arsiparis	D3	Terpenuhi
30	Tenaga Kontrak Kebersihan	SMA	Terpenuhi

Sumber : sub bagian umum dan Kepegawaian, 2021

Dari tabel diatas di beberapa jawatan masih belum terpenuhi diantaranya Jawatan Pelayanan masih membutuhkan Pengelola Pelayanan dan Jawatan Praja masih membutuhkan analis pemerintahan, pada sekertariat yang belum terpenuhi adalah analis perencanaan Evaluasi dan Pelaporan dan Verifikator Keuangan, hal ini tentunya menjadi kendala bagi kapanewon sehingga beberapa jabatan masih merangkap untuk melaksanakan tupoksi yang masih belum terpenuhi, efisiensi SDM dan memaksimalkan tupoksi SDM.

Tabel 2.2.2 Kondisi Pegawai berdasar tingkat pendidikan, Golongan dan jenis kelamin

Tingkat Pendidikan	Golongan			Jenis Kelamin	
	IV	III	II	L	P
SD	-	-	-	-	-
SMP	-	-	1	1	-
SMA/SMK	-	-	8	7	1
D3	-	-	1	1	-
S1	-	7	-	5	2
S2	2	1	-	2	-

Sumber : sub bagian umum dan Kepegawaian, 2021

### 2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kapanewon Dlingo didukung pula dengan sarana prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.2.3 Aset Kapanewon Dlingo

Jenis Barang	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		Analisa	
			Baik	Rusak	Kebutuhan	Kekurangan
I. Kendaraan	1 Sepeda motor	6	6	0	9	3
	2 Mobil Dinas	1	1	0	1	0
II. Komputer	1 Komputer	12	8	4	15	3
III. Lap Top	1 Laptop	14	9	5	14	0
IV. AC	1 AC	9	9	0	11	2
V. Meja Komputer	1 Meja Komputer	17	10	7	20	10
VI. Kursi Lipat	1 Kursi Rapat	54	30	14	120	90
VII. Alat Pendingi	1 Kulkas	2	2	0	3	1
VIII. Filing Kabinet	1 Filing Kabinet	3	3	0	10	7

Jenis Barang	Nama Barang		Jumlah	Kondisi		Analisa	
				Baik	Rusak	Kebutuhan	Kekurangan
IX. Rak Besi	1	Rak Besi	3	3	0	7	4
X. Meja Rapat	1	Meja Rapat	7	7	0	17	10
XI. Printer	1	Printer	9	9	3	14	5
XII. Kipas angin	1	Kipas angin	4	4	0	5	1
XIII. Blower	1	LC	1	1	0	2	1
XIV. LCD	1	LCD	2	2	0	3	1
XV. Camera	1	Camera	2	1	0	2	0
XVIII. CCTV	1	CCTV	3	3	0	8	5
XIX. Rak Arsip kayu	1	Rak arsip kayu	2	2	0	6	4

Sumber : sub bagian umum dan Kepegawaian, 2021

Berdasarkan tabel diatas, diketahui kebutuhan komputer yang masih belum terpenuhi, yaitu 9 unit di antaranya pada jawatan keamanan 1 unit, jawatan pelayanan 2 unit, jawatan sosial 1 unit, jawatan Praja 1 Unit, Jawatan Kemakmuran 1 unit dan sekretariat 3 unit, sementara komputer dan laptop yang tidak bisa digunakan yaitu untuk computer pada jawatan Kemakmuran 1 unit jawatan sosial 1 unit jawatan Ketertiban 1 unit dan jawatan pelayanan 1 unit.

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

#### 2.3.1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan OPD Kapanewon Dlingo dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang telah dilaksanakan Kantor Kapanewon Dlingo tiap tahunnya, dilihat dari Rasio Capaiannya yang meningkat tiap tahunnya. sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut pendapat masyarakat pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul dikategorikan Sangat Baik.

Hasil pengukuran IKM ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap unsur-unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan sekaligus berfungsi sebagai pendorong bagi Kantor Kapanewon Dlingo untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanannya. Guna lebih meningkatkan kualitas pelayanan Kantor Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul telah mengalokasikan anggaran untuk membiayai kegiatan yang ada di Kapanewon Dlingo.

Faktor pendukung tercapainya nilai IKM yang ada di Kapanewon Dlingo dikarenakan SDM di Jawatan Pelayanan sudah memadai, fasilitas yang ada juga sudah memadai, kemudian anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan pelayanan juga tercukupi sehingga kegiatan pelayanan berjalan dengan lancar dan tanpa kendala dan dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama dapat tercapai sesuai dengan target yang sudah ditentukan.

Adapun factor penghambat caaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah adanya pandemic *covid 19* di awal tahun 2020 sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena anggaran dialihkan ke anggaran penanggulangan *covid 19*.

Nilai capaian kinerja Kapanewon Dlingo selama kurun waktu 5 tahun peride Renstra Kapanewon Dlingo Tahun 2022-2026 Kapanewon Dlingo disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 – 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016–2021						Rasio Capaian (persen)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16=10/4	17=11/5	18=12/6	19=13/7	20=14/8
A	Indikator tujuan																		
	-																		
B	Indikator sasaran																		
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas																		
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70	80	85	90	90	90	81	95	95	91	96	90		118,75	111,98	101,39	106,62	100,00
	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	80	85	90	95	100	100	80	85	90	92	100	100		100,00	100,89	96,84	100,00	100,00
	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	75	80	85	88	90	90	75	80	89	100	90	90		100,00	104,71	113,64	100,00	100,00
	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	70	80	85	90	100	100	70	75	45	100	61	100		93,75	52,94	111,11	61,08	100,00
2017-2018																			
c				<b>Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan</b>	70	90	95.09	-	-	-	-	70	90	95.09	-	-	-	-	-
				Jumlah rapat, sosial isasi	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	-
				<b>Cakupan musrenbang kecamatan yang sesuai dengan program prioritas Kabupaten.</b>	-	100 persen	-	-	-	-	-	-	100 persen	-	-	-	-	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 - 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016-2021						Rasio Capaian (persen)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16=10/4	17=11/5	18=12/6	19=13/7	20=14/8
			Jumlah Lomba-lomba di kecamatan	-	7 kali	-	-	-	-	7 kali	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
			Jumlah pelaksanaan kegiatan MUSRENBANG Kecamatan	-	1 kali	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
			Jumlah keikutsertaan dalam bantuan ekspo	-	2 kali	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
			<b>Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan</b>	80 persen	85 persen	90 persen	-	-	-	85 persen	90 persen	-	-	-	100%	100%	-	-	-
			Jumlah pelaksanaan kegiatan MUSRENBANG Kecamatan	-	1 kali	1 kali	-	-	-	1 kali	1 kali	-	-	-	100%	100%	-	-	-
			Jumlah rakord pendampingan pengelolaan APBDes	-	2 kali	2 kali	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	100%	100%	-	-	-
			Jumlah rakor MUSPIKA kec .Dlingo	-	4 kali	4 kali	-	-	-	4 kali	4 kali	-	-	-	100%	100%	-	-	-
			Jumlah Pelaksanaan upacara hari besar nasional	-	14 kali	14 kali	-	-	-	14 kali	14 kali	-	-	-	100%	100%	-	-	-
			Jumlah dokumen profil dan monografi	-	3 dokumen	3 dokumen	-	-	-	3 dokumen	3 dokumen	-	-	-	100%	100%	-	-	-
			Jumlah rakor intensifikasi PBB	-	6 kali	6 kali	-	-	-	6 kali	6 kali	-	-	-	100%	100%	-	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 - 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016-2021						Rasio Capaian (persen)						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16=10/4	17=11/5	18=12/6	19=13/7	20=14/8	
			Jumlah rapat koordinasi	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	100%	100%	-	-	-
			<b>Cakupan pembinaan Sosial Kemasyarakatan</b>		80 persen	81 persen	-	-	-	-	80 persen	81 persen	-	-	-	100%	100%	-	-	-
			Jumlah rapat dan pembinaan		2 kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	100%	100%	-	-	-
			Jumlah kegiatan Gebyar budaya daerah		1 kali	1 kali	-	-	-	-	1 kali	1 kali	-	-	-	100%	100%	-	-	-
			Jumlah senam Rutin dan rakor OR		4 kali	22 kali	-	-	-	-	4 kali	22 kali	-	-	-	100%	100%	-	-	-
			Jumlah rakor Pemberantasan Penyakit Masyarakat		2 kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	100%	100%	-	-	-
			Jumlah rakor dan pemantauan Pemilihan pamong desa pamong		2 kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	100%	100%	-	-	-
			Jumlah rakor perlindungan perempuan dan anak		2 kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	100%	100%	-	-	-
			<b>Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tk Kecamatan</b>		80 persen	85 persen	-	-	-	-	80 persen	85 persen	-	-	-	100%	100%	-	-	-
			jumlah keikutsertaan dalam bantul		2 kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	100%	100%	-	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 - 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016-2021						Rasio Capaian (persen)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18=12/6	19=13/7	20=14/8
	ekspo dan karnaval																		
	Jumlah Pelaksanaan Lomba-lomba di kecamatan /desa		7 kali	7 kali	-	-	-	-	7 kali	7 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah penyelenggaraan kegiatan Perempuan kecamatan		4 kali	4 kali	-	-	-	-	4 kali	4 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah rapat koordinasi dan pemantauan lokasi rawan bencana		4 kali	4 kali	-	-	-	-	4 kali	4 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan		2 kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
	Jumlah rakor lingkungan hidup		2kali	2 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-
<b>2019-2020</b>																			
	<b>Capaian Nilai Evaluasi Kinerja</b>	-	<b>75 persen</b>	<b>76 persen</b>	<b>77 persen</b>	<b>78 persen</b>	-	-	<b>75 persen</b>	<b>76 persen</b>	<b>94,39 persen</b>	<b>85 persen</b>	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>123%</b>	<b>122%</b>	-
	Jumlah laporan capaian kinerja barang, keuangan, kepegawaian	-	36 dokumen	36 dokumen	-	-	-	-	36 dokumen	36 dokumen	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 - 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016-2021						Rasio Capaian (persen)						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16=10/4	17=11/5	18=12/6	19=13/7	20=14/8	
	Jumlah laporan capaian kinerja	-	-	-	12 dokumen	-	-	-	-	-	12 dokumen	-	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Dokumen perencanaan	-	-	-	-	5 dokumen	-	-	-	-	-	5 dokumen	-	-	-	-	-	-	100%	-
	dokumen keuangan dan aset	-	-	-	-	37 dokumen	-	-	-	-	-	37 dokumen	-	-	-	-	-	-	100%	-
	dokumen evaluasi	-	-	-	-	7 laporan	-	-	-	-	-	7 laporan	-	-	-	-	-	-	100%	-
	Dokumen Kepegawaian	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	-	100%	-
	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	-	-	-	90 persen	-	-	-	-	-	91,25 persen	-	-	-	-	-	-	101%	-	-
	Jumlah pelaksanaan rapat / sosialisasi	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jenis layanan yang diberikan					16 jenis						16 jenis							100%	
	Mayarakat yang dilayani					4000 orang						4000 orang							100%	
	<b>cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Kecamatan</b>	-	-	-	82 persen	-	-	-	-	-	82 persen	-	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah rapat koordinasi / gebyar PAUD Kecamatan	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	-	-	100%	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 - 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016-2021						Rasio Capaian (persen)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16=10/4	17=11/5	18=12/6	19=13/7	20=14/8
	Jumlah pembinaan keimanan ketaqwaan serta rakor	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah kegiatan gebyar budaya daerah	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah senam rutin dan rakor olah raga	-	-	-	22 kali	-	-	-	-	-	22 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah rakor pemberantasan penyakit masyarakat	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah rakor dan pemantauan pemilihan pamong desa	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah rakor perlindungan perempuan dan anak	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	<b>Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umumdi Tingkat Kecamatan</b>	-	-	-	95 persen	100 persen	-	-	-	-	95 persen	100 persen	-	-	-	-	100%	<b>100%</b>	-
	Jumlah rapat koordinasi	-	-	-	3 kali	-	-	-	-	-	3 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah rapat koordinasi	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 - 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016-2021						Rasio Capaian (persen)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18=12/6	19=13/7	20=14/8
	Jumlah pelaksanaan upacara kenegaraan /hari besar nasional dan upacara 17 an setiap bulan	-	-	-	17 kali	-	-	-	-	-	17 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah rapat intensifikasi PBB	-	-	-	3 kali	-	-	-	-	-	3 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah rakor pendampingan pengelolaan APBDes	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah Rakor Muspika	-	-	-	12 kali	-	-	-	-	-	12 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah pelaksanaan kegiatan Musrenbang Kecamatan	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Laporan hasil rapat koordinasi unsur Muspika	-	-	-	-	5 laporan	-	-	-	-	-	5 laporan	-	-	-	-	100%	-	-
	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional	-	-	-	-	5 kali	-	-	-	-	-	5 kali	-	-	-	-	100%	-	-
	Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	-	-	-	-	2 laporan	-	-	-	-	-	2 laporan	-	-	-	-	100%	-	-
	Pembinaan Linmas / kelompok masyarakat	-	-	-	-	50 orang	-	-	-	-	-	50 orang	-	-	-	-	100%	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 - 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016-2021						Rasio Capaian (persen)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18=12/6	19=13/7	20=14/8
	Laporan monev penanggulangan bencana	-	-	-	-	4 laporan	-	-	-	-	-	4 laporan	-	-	-	-	100%	-	-
	Dokumen monografi kecamatan	-	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	-	100%	-	-
	laporan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	-	-	-	-	6 laporan	-	-	-	-	-	6 laporan	-	-	-	-	100%	-	-
	laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	-	-	-	-	2 laporan	-	-	-	-	-	2 laporan	-	-	-	-	100%	-	-
	Pendampingan pengelolaan keuangan desa	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	100%	-	-
	Laporan pemantauan Pilkada dan atau pilurdes	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	100%	-	-
	<b>Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kecamatan</b>	-	-	-	<b>90 persen</b>	<b>100 persen</b>	-	-	-	-	<b>90 persen</b>	<b>100 persen</b>	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100 persen%</b>	-
	Jumlah keikutsertaan Bantuan Expo karnaval dan rakor PAS	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah keikutsertaan lomba lomba	-	-	-	10 kali	-	-	-	-	-	10 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 - 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016-2021						Rasio Capaian (persen)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18=12/6	19=13/7	20=14/8
	kecamatan / desa																		
	Jumlah rakor pemberdayaan perempuan	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	-	4 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah rakor dan pemantauan lokasi rawan bencana	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah rakor kemiskinan	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Jumlah rakor pengelolaan lingkungan hidup	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	100%	-	-
	Laporan pendampingan kelompok usaha	-	-	-	-	1 laporan	-	-	-	-	-	1 laporan	-	-	-	-	-	100%	-
	laporan Pendampingan Lomba Tingkat Kabupaten	-	-	-	-	2 laporan	-	-	-	-	-	2 laporan	-	-	-	-	-	100%	-
	Dukumen Musrenbang Kecamatan	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100%	-
	Laporan Pembinaan bidang keagamaan	-	-	-	-	1 laporan	-	-	-	-	-	1 laporan	-	-	-	-	-	100%	-
	Laporan pembinaan bidang kesehatan	-	-	-	-	3 laporan	-	-	-	-	-	3 laporan	-	-	-	-	-	100%	-
	laporan pembinaan bidang sosial	-	-	-	-	1 laporan	-	-	-	-	-	1 laporan	-	-	-	-	-	100%	-

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah			Target Renstra Tahun 2016 - 2021					Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016-2021					Rasio Capaian (persen)							
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16=10/4	17=11/5	18=12/6	19=13/7	20=14/8
			Laporan Upaya Penganggulan Kemiskinan	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	-	1 kali	-	-	-	-	-	100%	-
<b>2021</b>																					
			<b>capaian nilai evaluasi kinerja</b>	-	-	-	-	-	<b>79 angka</b>	-	-	-	-	-	<b>79 angka</b>	-	-	-	-	-	<b>100%</b>
			Dokumen Evaluasi	-	-	-	-	-	7 dokumen	-	-	-	-	-	7 dokumen	-	-	-	-	-	100%
			Dokumen Kepegawaian	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100%
			Dokumen Keuangan dan Aset	-	-	-	-	-	37 dokumen	-	-	-	-	-	37 dokumen	-	-	-	-	-	100%
			Dokumen Perencanaan	-	-	-	-	-	5 dokumen	-	-	-	-	-	5 dokumen	-	-	-	-	-	100%
			<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	-	-	-	-	-	<b>90 angka</b>	-	-	-	-	-	<b>90 angka</b>	-	-	-	-	-	<b>100%</b>
			<b>cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan</b>	-	-	-	-	-	<b>95 persen</b>	-	-	-	-	-	<b>95 persen</b>	-	-	-	-	-	<b>100%</b>
			cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	-	95 persen	-	-	-	-	-	95 persen	-	-	-	-	-	100%
			laporan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100%

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 - 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016-2021						Rasio Capaian (persen)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16=10/4	17=11/5	18=12/6	19=13/7	20=14/8
	laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	Pendampingan pengelolaan keuangan desa	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	-	-	90 angka	-	-	-	-	-	90 angka	-	-	-	-	-	100%
	jenis layanan yang diberikan	-	-	-	-	-	14 jeni	-	-	-	-	-	14 jeni	-	-	-	-	-	100%
	masyarakat yang dilayani	-	-	-	-	-	4000 orang	-	-	-	-	-	4000 orang	-	-	-	-	-	100%
	<b>Cakupan Pelayanan Sosial Masyarakat</b>	-	-	-	-	-	<b>85 persen</b>	-	-	-	-	-	<b>85 persen</b>	-	-	-	-	-	<b>100%</b>
	cakupan pelayanan sosial masyarakat	-	-	-	-	-	85 persen	-	-	-	-	-	85 persen	-	-	-	-	-	100%
	Dukumen Musrenbang Kecamatan	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	laporan pendampingan kelompok usaha	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	laporan pendampingan lomba	-	-	-	-	-	4 dokumen	-	-	-	-	-	4 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	promosi produk masyarakat	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	2 kali	-	-	-	-	-	100%

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 - 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016-2021						Rasio Capaian (persen)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18=12/6	19=13/7	20=14/8
	Laoran Pembinaan Bidang pendidikan dan kepemudaan	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	Laporan Pembinaan bidang keagamaan	-	-	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	laporan pembinaan bidang kebudayaan	-	-	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	Laporan pembinaan bidang kesehatan	-	-	-	-	-	22 dokumen	-	-	-	-	-	22 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	laporan pembinaan bidang sosial	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	Laporan Upaya Penganggulan Kemiskinan	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	<b>capaian penyelenggaraan pemerintahan umum di tingkat kecamatan</b>	-	-	-	-	-	<b>100 persen</b>	-	-	-	-	-	<b>100 persen</b>	-	-	-	-	-	<b>100%</b>
	capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	-	-	-	-	-	100 persen	-	-	-	-	-	100 persen	-	-	-	-	-	100%
	Laporan monev penanggulangan bencana	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100%

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Tahun 2016 - 2021						Realisasi Capaian Renstra Tahun 2016-2021						Rasio Capaian (persen)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=9/3	16= 10/4	17=11/5	18=12/6	19=13/7	20=14/8
	Laporan Pemantauan Keamanan Lingkungan	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	2 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	Pembinaan Linmas / kelompok masyarakat	-	-	-	-	-	50 dokumen	-	-	-	-	-	50 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	<b>Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan</b>	-	-	-	-	-	<b>100 persen</b>	-	-	-	-	-	<b>100 persen</b>	-	-	-	-	-	<b>100%</b>
	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	-	-	-	-	-	100 persen	-	-	-	-	-	100 persen	-	-	-	-	-	100%
	laporan koordinasi unsur muspika	-	-	-	-	-	4 dokumen	-	-	-	-	-	4 dokumen	-	-	-	-	-	100%
	pelaksanaan upacara hari besar nasional	-	-	-	-	-	12 dokumen	-	-	-	-	-	12 dokumen	-	-	-	-	-	100%

### 2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Tabel 2.3.2  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran (dalam juta rupiah)						Realisasi (dalam juta rupiah)						Rasio Realisasi dan Anggaran (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja Tidak langsung	1.121,85	1.115,31	1.064,27	1.111,10	1.178,85	-	1.084,35	1.009,51	993,28	1.028,65	1.044,96	-	96,70	90,50	93,30	92,60	88,60	-
2	Belanja Langsung	636,92	811,03	829,05	804,54	680,00	-	608,95	809,39	827,97	802,68	673,02	-	95,61	99,80	99,87	99,77	98,97	-
3	Belanja Pegawai	57,84	44,64	91,73	95,03	96,58	-	32,40	44,64	91,73	95,03	96,58	-	56,00	100,00	100,00	100,00	100	-
4	Belanja Barang jasa	457,81	714,06	689,32	654,01	545,07	-	461,56	712,42	688,24	652,14	538,09	-	100,80	99,80	99,80	99,70	98,70	-
5	Belanja Modal	121,28	52,33	48,00	55,51	38,35	-	114,99	52,33	48,00	55,51	38,35	-	94,80	100,00	100,00	100,00	100	-
	Belanja:						3.000,83						3.000,83						100
6	Belanja Operasi	-	-	-	-	-	2.985,95	-	-	-	-	-	2.985,95	-	-	-	-	-	100
7	Belanja Modal	-	-	-	-	-	14,88	-	-	-	-	-	14,88	-	-	-	-	-	100

Sumber : Data Subbag Program dan Keuangan Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk realisasi keuangan dari tahun 2016-2021 dapat tercapai. Hal ini disebabkan adanya komitmen dari semua pihak sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang sudah ditentukan.

Berdasarkan tren capaian dari tahun 2016-2021, maka tahun 2018 merupakan tahun dengan pencapaian realisasi paling tinggi disbanding dengan tahun-tahun yang lain karena semua kegiatan dapat dilaksanakan. Sedangkan tahun 2016 merupakan capaian realisasi paling rendah karena tidak semua anggaran terserap, meskipun kegiatan dapat terlaksana semua. Adapun faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Kapanewon Dlingo antara lain :

1. Perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan program kegiatan yang akan dilaksanakan
2. Penjadwalan kegiatan sesuai dengan kebutuhan kegiatan
3. Komitmen dari semua pihak untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang sudah ditentukan.
4. Adanya refocusing dialihkan untuk penanganannya covid-19 di pertengahan tahun anggaran 2020

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Kapanewon Dlingo dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Informasi tentang mekanisme dan regulasi pelayanan dari pemerintah sering berubah dan kadang tidak sesuai dengan kondisi di wilayah.
- b. Perubahan perkembangan eksternal yang sangat cepat terjadi.
- c. Perubahan tugas dan fungsi kecamatan menjadi kapanewon sehingga terjadi perubahan dalam ketugasan dan kewenangannya.
- d. Adanya pandemi *Covid 19* yang belum berhenti dan berakibat pada *refocusing* penganggaran kapanewon terpusat di penanganan pandemi *Covid 19*.

Sedangkan peluang bagi Kapanewon Dlingo dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Inovasi dan kreatifitas masih terbuka lebar untuk dilaksanakan.
- b. Adanya jaringan internet dan media sosial sehingga Informasi dan praktek baik yang dilaksanakan di luar daerah mudah didapatkan

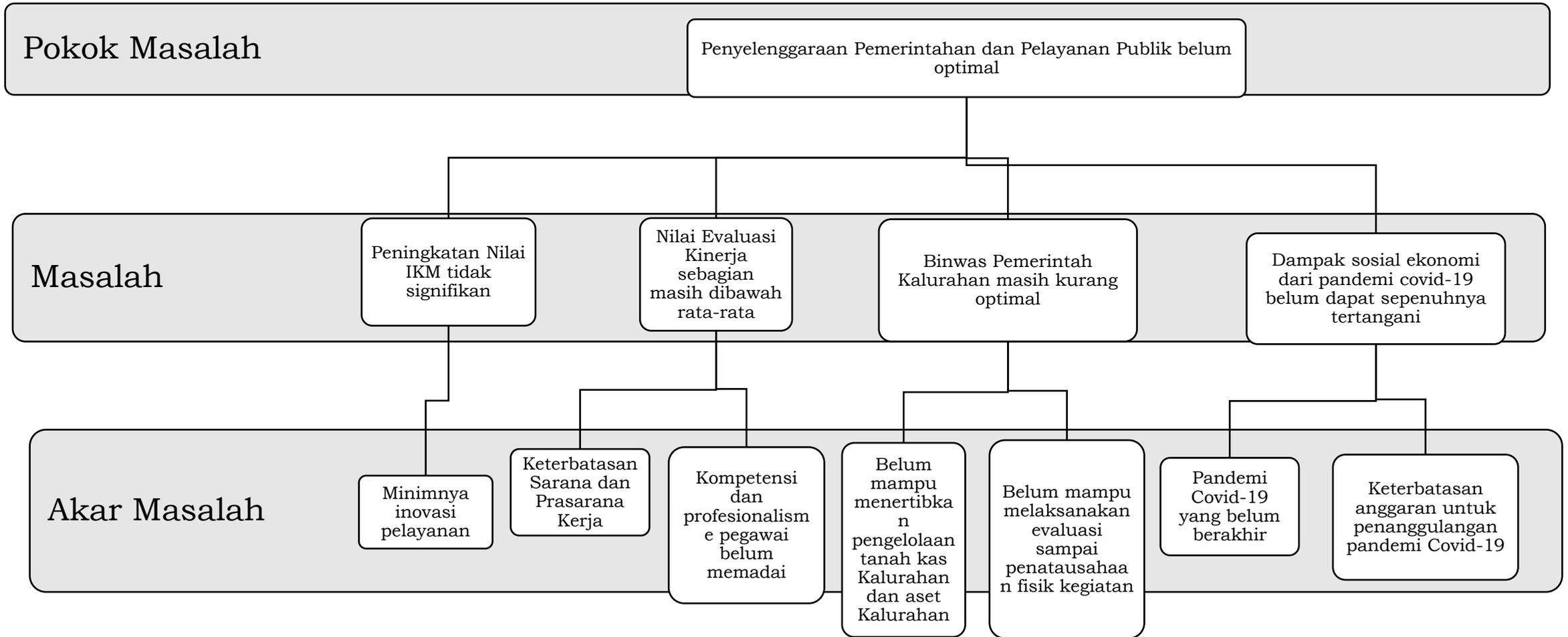
- c. Terjalannya hubungan yang baik dengan pihak luar sehingga memudahkan komunikasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan
- d. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada desa semakin meningkat memudahkan penyusunan perencanaan pembangunan kapanewon dan mendukung terjadinya percepatan capaian realisasi program pembangunan desa.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kapanewon Dlingo masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut

Gambar 3. 1  
Analisis Pohon Masalah



Tabel 3.1

## Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik belum optimal	Peningkatan Nilai IKM tidak signifikan	1. Keterbatasan inovasi pelayanan
		Nilai Evaluasi Kinerja sebagian masih dibawah rata-rata	1. Keterbatasan sarana dan prasarana kerja 2. Kompetensi dan profesionalisme aparatur belum memadai
		Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan masih lemah	1. Belum mampu menertibkan pengelolaan tanah kas Kalurahan dan aset Kalurahan 2. Belum mampu melakukan evaluasi sampai penatausahaan dan fisik kegiatan
		Dampak sosial ekonomi dari pandemi covid-19 belum dapat sepenuhnya tertangani	1. Pandemi Covid-19 yang belum berakhir 2. Keterbatasan anggaran untuk penanggulangan pandemi Covid-19

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Harmonis** yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
2. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.

3. **Berkeadilan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata

Berdasarkan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kualitas pelayanan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi.

2. Pengembangan Sumber daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.

Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang cakap, mampu bersaing dan berkarakter budaya Yogyakarta.

3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.

Misi ini dimaksudkan mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pemanfaatan pendayagunaan potensi lokal yang didukung oleh penerapan teknologi dan kemudahan investasi.

4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemenuhan infrastruktur publik dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.

5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan dan Difabel.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemenuhan infrastruktur publik dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka tugas dan fungsi Kapanewon Dlingo terkait erat dengan pencapaian misi ke-1 yaitu penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Dlingo terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

- a. Penataan organisasi, perbaikan ketatalaksanaan dan pengembangan sumber daya apratur
- b. Pengintergrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan sampai mempertanggungjawabkan kegiatan
- c. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan public yang mudah, cepat akurat

Tabel 3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Dlingo terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

No	Misi RPJMD	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Misi ke-1RPJMD : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima.	a. Penataan organisasi,perbaikan ketatalaksanaan dan pengembangan sumber daya apratur	1.Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	1. Keterbatasan sarana prasarana
			2. Dukungan dan pembinaan petugas instansi terkait.	2. Pandemi Covid-19 yang belum berakhir
				3. Rendahnya pemahaman dan pengetahuan tentang regulasi terkait;
		b. Pengintergrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, konsistensi dan akuntabilitas proses perencanaan sampai mempertanggungjawabkan kegiatan	1. Dukungan dan pembinaan petugas instansi terkait.	1. Rendahnya pemahaman dan pengetahuan tentang regulasi terkait;
			2. Ketersediaan regulasi sebagai payung hukum kebijakan;	2. Keterbatasan sarana prasarana
		c. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan public yang mudah, cepat akurat	1. SIPD sudah terintegrasi dalam perencanaan dari tingkat Kabupaten, Kapanewon	1. Kesulitan pengoperasian SIPD yang tidak terkoneksi dengan data pada sistem perencanaan sebelumnya.

No	Misi RPJMD	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
			2. Ketersediaan sarpras, jaringan sistem informasi yang baik, SOP yang mengatur prosedur pelayanan.	2. Keterbatasan sarana prasarana;
			3. Komitmen Kapanewon dalam kepuasan pelayanan.	
			4. Ketersediaan sarpras, jaringan sistem informasi yang baik, SOP yang mengatur prosedur pelayanan.	

Dari Tabel 3.2.1 telah terpetakan beberapa faktor pendorong sekaligus penghambat dalam upaya pencapaian visi dan misi Bupati beserta Wakil Bupati Bantul. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi Kapanewon Dlingo sebagai salah satu unsur pendukung Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas pelayanan publik dan pemerintahan umum kewilayahan di Kapanewon Dlingo, maka beberapa faktor pendorong dapat dimaksimalkan untuk menekan dan menghilangkan faktor penghambat, sehingga pencapaian visi dan misi pertama Bupati beserta Wakil Bupati Kabupaten Bantul dapat lebih mudah terpenuhi. Upaya untuk menguatkan faktor pendorong dan menghilangkan faktor penghambat adalah sebagaiberikut :

1. Mendukung Peningkatan dan Pengembangan SDM terutama SDM di Kapanewon dan Kalurahan
2. Dukungan Penganggaran Pemulihan dampak Pandemi Covid-19
3. Mendukung tambahan sarana Prasarana dalam penyelenggaraan Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan public yang mudah, cepat akurat
4. Mendukung Kalurahan dalam penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu Disetiap pedukuhan melalui fasilitasi secara intens dengan instansi terkait, dalam upaya peningkatan kapasitas dan kreatifitas kader, maupun dukungan terhadap sarana prasarana;

5. Mendukung ekonomi kreatif di Kapanewon dengan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, pendampingan dan keikutsertaan dalam even promosi secara intensif.
6. Meningkatkan kegiatan, koordinasi, sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terhadap kelestarian lingkungan, kepada masyarakat, kalurahan dan stakeholders secara intensif.
7. Meningkatkan fasilitasi, koordinasi dan konsultasi untuk mencapai sinergitas antar berbagai lembaga

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

#### **3.3.1. Telaahan Renstra K/L**

Berdasarkan telaah terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020 – 2024, dapat diketahui tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020 – 2024, sebagai berikut:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis pada Tujuan Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan Kesatuan Bangsa, sebagai berikut :
  - a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia dengan indikator meliputi :
    1. Indeks Demokrasi Indonesia.
    2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam PEMILUKADA dan PEMILU.
    3. Indeks Kinerja ORMAS.
  - b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah dengan indikator sasaran meliputi :
    1. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
    2. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
    3. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
    4. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya
  - c. Meningkatnya kewaspadaan nasional dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.
  - d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dengan indikator sasaran, meliputi :

1. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “BAIK”.
  2. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.
2. Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Kapasitas dan Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah, serta Pelayanan Publik yang berkualitas dan Penguatan Inovasi, sebagai berikut :
- a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dengan indikator sasaran, meliputi :
    1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
    2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
    3. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
    4. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
  - b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk hukum Daerah
  - c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif dengan indikator sasaran, meliputi :
    1. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
    2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
    3. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
    4. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
    5. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
    6. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
    7. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
    8. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
    9. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
    10. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
  - d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan dengan indikator sasaran, meliputi :

1. Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
  2. Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).
- e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan, dengan indikator sasaran yaitu : Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.
3. Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut :
- a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran sebagai Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
  - b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas, dengan indikator sasaran, meliputi :
    1. Indeks Pengawasan Internal.
    2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
  - c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Tabel 3.3

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri

<b>NO</b>	<b>SASARAN RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI</b>	<b>FAKTOR PENGHAMBAT</b>	<b>FAKTOR PENDORONG</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Masih adanya praktik politik yang tidak sehat	Tingkat pendidikan masyarakat relatif tinggi
2.	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Pembelajaran tentang Pancasila di lembaga Pendidikan sudah mulai berkurang	Ketersediaan Anggaran untuk penyelenggaraan sosialisasi 4 Pilar kebangsaan
3.	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Masih adanya gerakan radikalisme	Kesadaran Masyarakat dalam penghormatan lagu kebangsaan

NO	SASARAN RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)
			INDONESIA RAYA yang selalu diperdengarkan setiap jam 08:00
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Kapasitas Personil belum memadai	Adanya Kelompok Organisasi Masyarakat yang bergerak di Bidang TRANTIBUMLINMAS
5.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan anggaran untuk peningkatan kapasitas dan kualitas yang masih kurang.</li> <li>2. Materi DIKLAT yang kurang representative.</li> <li>3. Kesungguhan dalam mengikuti Diklat masih kurang</li> </ol>	Kompetisi yang sehat dengan didukung pola karier yang jelas
6.	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Masih adanya dualisme pengaturan di tingkat Kalurahan	Tingkat kesadaran pengetahuan terhadap hukum relatif tinggi
7.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya perhatian terhadap hasil inovasi daerah</li> <li>2. Tingkat kemanfaatan sebuah inovasi masih kurang</li> </ol>	Kompetisi antar daerah dalam mendapatkan AWARD
8.	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	sistem dan ruangan pelayanan yang masih kurang representatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran Masyarakat dalam mengurus kelengkapan administrasi kependudukan</li> <li>2. Penyederhanaan pengurusan pindah masih dalam lingkup satu kecamatan</li> </ol>
9.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Kurang meratanya tingkat kapabilitas ASN antar wilayah	Kompetisi antar daerah dalam meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

NO	SASARAN RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)
10.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	1. Inefisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran. 2. Masih adanya PATOLOGI BIROKRASI dilingkungan kerja	1. Kemauan dan Komitmen politik yang kuat mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan tingkat terendah 2. Kesamaan Persepsi dan Tujuan. 3. Ketersediaan dana/anggaran
11.	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	Manajemen Pelayanan Publik yang kurang maksimal	Profesionalitas dan Kapabilitas ASN yang tinggi
12.	Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Apresiasi terhadap hasil penelitian masih kurang	Kompetisi yang sehat dalam mewujudkan tingkat realisasi kinerja perangkat organisasi

### 3.3.2. Telaahan Renstra Perangkat Daerah DIY

Berdasarkan hasil telaahan Kapanewon Dlingo tidak ada Renstra K/L yang terkait langsung.

## 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis

### 3.4.1. Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana. Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Dlingo ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut

Tabel 3.4 Hasil Telaahan RTRW dan Implikasi Terhadap Pelayanan Kapanewon Dlingo

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/ Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten melalui penetapan pusat pelayanan.	Mempercepat pengembangan infrastruktur pelayanan publik di kawasan ibu kota kapanewon.	Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan, Ibu kota Kapanewon Dlingo masuk dalam Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	1. Ketersediaan lahan yang terbatas.	1. Adanya pagu kapanewon dalam Mursenbang 2. Jarak ke ibukota Kabupaten cukup jauh, sehingga diusahakan dapat dilayani di Kapanewon Dlingo
Sistem Persampahan.	Sistem Persampahan.	Pengelolaan sampah dengan prinsip mengurangi, memanfaatkan, dan mendaur ulang sampah.	Meningkatkan kapasitas BUMDes dalam pelayanan pengelolaan sampah rumah tangga dan daur ulang sampah.	Pengurangan, pemilahan, dan pengumpulan sampah di tingkat komunal di kalurahan Dlingo	1. Keterbatasan SDM. 2. Perilaku masyarakat, sampah anorganik masih banyak dibakar atau dipendam	Koordinasi dengan Kalurahan berjalan dengan baik.

Telaah Rencana Pola Ruang

Kawasan Lindung Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kawasan perlindungan setempat.</li> <li>2. Kawasan Rawan Bencana.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kawasan perlindungan hutan pinus, Tahura</li> <li>2. Kawasan rawan bencana tanah longsor dan kekeringan</li> </ol>	Meningkatkan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, khususnya penanggulangan bencana.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kawasan hutan pinus di Kalurahan Mangunan, Muntuk, Terong dan Jatimulyo.</li> <li>2. Kawasan rawan tanah longsor dan kekeringan di hampir semua wilayah</li> </ol>	Keterbatasan Koordinasi	Forum koordinasi pimpinan kapanewon dan pemerintah kalurahan terjalin dengan baik.
Kawasan Budidaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kawasan Peruntukan Pertanian.</li> <li>2. Kawasan Peruntukan Pariwisata.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kawasan pertanian lahan kering</li> <li>2. Kawasan peruntukan pariwisata/ Agrowisata (Hutan Pinus)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan koordinasi pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang.</li> <li>2. Meningkatkan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kalurahan Jatimulyo, Terong, Muntuk, Dlingo</li> <li>2. Kalurahan Mangunan, Muntuk, Terong</li> </ol>	Keterbatasan anggaran.	Fasilitasi dan pemberdayaan kelompok masyarakat berjalan baik.

### 3.4.2. Telaahan KLHS

Berdasarkan hasil KHLS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan Kapanewon Dlingo sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS.

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Dlingo sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Kapanewon Dlingo yang akan ditangani pada periode Tahun 2021-2026 yang tersisa 5 tahun kedepan (2021-2026) adalah sebagai berikut:

- 1) Pandemi covid-19 yang melumpuhkan sektor pariwisata di wilayah
- 2) Akses terhadap air minum yang layak belum merata. Beberapa desa kesulitan mengakses air bersih saat musim kemarau.
- 3) Peningkatan koordinasi yang terpadu antar Instansi di wilayah Kapanewon dan PD terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan secara optimal.
- 4) Perkembangan wilayah sebagai Destinasi Wisata memungkinkan banyak dibukanya sarana dan prasarana yang mendukung wisata dan belum terintegrasinya wisata yang ada di Kapanewon Dlingo diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan wilayah di Kapanewon Dlingo.
- 5) Adanya kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, maka Kapanewon harus benar-benar mampu memanfaatkan peluang tersebut dengan terus memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 6) Dalam upaya peningkatan daya saing daerah maka program “Produk Andalan Setempat (PAS)” khususnya kerajinan kayu dan bamboo serta kuliner yang mendukung wisata di Kapanewon Dlingo diharapkan dapat terwujud melalui komitmen bersama, arah kebijakan yang jelas dan terpadu, serta berkelanjutan.

## **BAB IV.**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Dlingo disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Dlingo

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Renstra	Target					Kondisi akhir Renstra
			(Tahun baseline/ Tahun 2021)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	90	90	90	91	91	92	92

Sumber: RPJMD Kabupaten Bantul 2021-2026

**BAB V.**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Strategi Kapanewon Dlingo ditetapkan berdasarkan analisis terhadap faktor internal (Strength-Weakness) dan faktor eksternal (Opportunity-Threat) serta berdasarkan masalah dan isu strategis yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis SWOT Kapanewon Dlingo adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Analisis SWOT

<b>FAKTOR INTERNAL</b>	<b>KEKUATAN (STRENGTHS)</b>	<b>KELEMAHAN (WEAKNESS)</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kuantitas SDM cukup memenuhi</li> <li>2. Dukungan sarana prasarana kapanewon yang memadai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimnya inovasi pelayanan</li> <li>2. Kompetensi dan profesionalisme pegawai belum memadai</li> <li>3. Dampak sosial ekonomi dari pandemi covid-19 belum dapat sepenuhnya tertangani</li> </ol>
<b>FAKTOR EKSTERNAL</b>	<b>STRATEGI S-O</b>	<b>STRATEGI W-O</b>
<b>PELUANG (OPPORTUNITIES)</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peluang terbuka lebar untuk mengembangkan Inovasi dan kreativitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi,</li> <li>2. Penataan kelembagaan perangkat daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021</li> <li>3. Semakin meningkatnya ketersediaan Teknologi Informasi untuk mempercepat alur penyusunan perencanaan, sistem pelaporan dan penggunaan dalam pelayanan masyarakat.</li> <li>4. Penguatan peran Panewu dalam menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan</li> <li>5. Dana kalurahan dan Alokasi Dana Kalurahan yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada Kalurahan semakin meningkat</li> <li>6. Terjalannya hubungan yang baik dengan pihak luar</li> <li>7. Pengembangan Produk Andalan Setempat</li> <li>8. Kapanewon Dlingo sebagai Kawasan Cagar Budaya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik berbasis IT yang berorientasi pada jangkauan pelayanan dan kepuasan masyarakat <b>(S1,2 - O1- -4)</b></li> <li>2. Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kalurahan untuk Peningkatan Produk Andalan Setempat <b>(S1,2 - O4-11)</b></li> <li>3. Penyelenggaraan Inovasi yang mampu mendorong peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan masyarakat sesuai dengan standar mutu pelayanan. <b>(S1,2 - O1-4)</b></li> <li>4. Pemantapan teknologi informasi dalam pelayanan masyarakat <b>(S1,2 - O1-4)</b></li> <li>5. Pemenuhan sarana dan prasarana publik yang berkualitas dan ramah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>15. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik untuk penanganan pandemic covid-19 <b>(W1-3 - O1-4)</b></li> <li>16. Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kalurahan yang terdampak covid-19 (W1-3 - O4-11)</li> <li>17. Peningkatan Koordinasi intensif Kapanewon dengan Pamong Kalurahan dan Padukuhan <b>(W1-3 - O4-11)</b></li> <li>18. Peningkatan kapasitas SDM Kalurahan melalui sosialisasi Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Bimtek Penyusunan RPJMKal, Bimtek penyusunan Laporan LPPD Kalurahan. <b>(W1-3 - O4-11)</b></li> </ol>

<p style="text-align: center;"><b>FAKTOR INTERNAL</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>KEKUATAN (STRENGTHS)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>KELEMAHAN (WEAKNESS)</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>FAKTOR EKSTERNAL</b></p> <p>9. Kapanewon Dlingo sebagai Kawasan Peruntukan Wisata  10. Kapanewon Dlingo sebagai Kawasan pertanian lahan kering  11. Adanya Dukungan anggaran dari Dana Keistimewaan untuk Perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan dan Implementasi Budaya SATRIYA di Kapanewon.</p>	<p>difabel, ramah anak dan perempuan (<b>S1,2 - O1-4</b>)  6. Pelaksanaan Protokol kesehatan berjalan tertib dalam pelayanan masyarakat (<b>S1,2 - O1-4</b>)  7. Fasilitasi pemberian informasi dan edukasi tentang SOP Pelayanan dan regulasi yang terupdate kepada Petugas Pelayanan dan Masyarakat. (<b>S1,2 - O1-4</b>)  8. Pelestarian dan pemeliharaan cagar budaya yang dimiliki diantaranya Museum Batik dan Rumah Bupati Juru Kunci Makam Surakarta. (<b>S1,2 - O8</b>)  9. Pemenuhan akses sarana dan prasarana publik dan akomodasi menuju destinasi wisata. (<b>S1,2 - O9</b>)  10. Pengembangan industry kreatif dan peningkatan kualitas produk andalan setempat (PAS) melalui inovasi kualitas produk, inovasi kemasan maupun strategi pemasaran agar mampu berdaya saing dan mampu menjadi daya tarik pengunjung wisatawan. (<b>S1,2 - O4-9</b>)  11. Pengembangan Pertanian Pangan organik menuju kedaulatan pangan (<b>S1,2 - O5-9</b>)  12. Peningkatan Ketahanan Pangan (<b>S1,2 - O5-9</b>)  13. Peningkatan SDM Perikanan, melalui pembinaan kelompok pembudidaya ikan (gapokdakan) (<b>S1,2 - O5-9</b>)  14. Pembinaan pengelolaan sampah rumah tangga mulai dari Tingkat Kapanewon, Kalurahan, Dusun, RT sampai Dasawisma. (<b>S1,2 - O5-9</b>)</p>	<p>1. Minimnya inovasi pelayanan  2. Kompetensi dan profesionalisme pegawai belum memadai  3. Dampak sosial ekonomi dari pandemi covid-19 belum dapat sepenuhnya tertangani</p>
<p style="text-align: center;"><b>ANCAMAN (THREATS)</b></p> <p>1. Informasi tentang mekanisme dan regulasi dari pemerintah sering</p>	<p style="text-align: center;"><b>STRATEGI S-T</b></p> <p>19. Penguatan Koordinasi Ketentraman Dan</p>	<p style="text-align: center;"><b>STRATEGI W-T</b></p> <p>23. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</p>



Strategi Hasil SWOT	Pengelompokan Strategi
<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pemenuhan sarana dan prasarana publik yang berkualitas dan ramah difabel, ramah anak dan perempuan <b>(S5)</b></li> <li>5. Pelaksanaan Protokol kesehatan berjalan tertib dalam pelayanan masyarakat <b>(S6)</b></li> <li>6. Fasilitasi pemberian informasi dan edukasi tentang SOP Pelayanan dan regulasi yang terupdate kepada Petugas Pelayanan dan Masyarakat. <b>(S7)</b></li> <li>7. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik untuk penanganan pandemic covid-19 <b>(S15)</b></li> <li>8. Peningkatan kapasitas SDM Kalurahan melalui sosialisasi Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Bimtek Penyusunan RPJMKal, Bimtek penyusunan Laporan LPPD Kalurahan. <b>(S18)</b></li> </ol>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kalurahan untuk Peningkatan Produk Andalan Setempat <b>(S2)</b></li> <li>2. Pelestarian dan pemeliharaan cagar budaya yang dimiliki diantaranya Museum Batik dan Rumah Bupati Juru Kunci Makam Surakarta. <b>(S8)</b></li> <li>3. Pemenuhan akses sarana dan prasarana publik dan akomodasi menuju destinasi wisata. <b>(S9)</b></li> <li>4. Pengembangan industry kreatif dan peningkatan kualitas produk andalan setempat (PAS) melalui inovasi kualitas produk, inovasi kemasan maupun strategi pemasaran agar mampu berdaya saing dan mampu menjadi daya tarik pengunjung wisatawan. <b>(S10)</b></li> <li>5. Pengembangan Pertanian Pangan organik menuju kedaulatan pangan <b>(S11)</b></li> <li>6. Peningkatan Ketahanan Pangan<b>(S12)</b></li> <li>7. Peningkatan SDM Perikanan, melalui pembinaan kelompok pembudidaya ikan (gapokdakan) <b>(S13)</b></li> <li>8. Pembinaan pengelolaan sampah rumah tangga mulai dari Tingkat Kapanewon, Kalurahan, Dusun, RT sampai Dasawisma. <b>(S14)</b></li> <li>9. Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan yang terdampak covid-19 <b>(S16)</b></li> </ol>	<p>Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kalurahan untuk Peningkatan Produk Andalan Setempat <b>(S2)</b></p>

<b>Strategi Hasil SWOT</b>	<b>Pengelompokan Strategi</b>
1. Penguatan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum untuk penyelenggaraan trantibum dan penanganan bencana terpadu dan berkesinambungan bersama muspikap, FPRB, Linmas dan RAPI. <b>(S19)</b> 2. Fasilitasi Mitigasi bencana pada kawasan penyangga cagar budaya di wilayah makam raja-raja karena sering terjadi longsor dan banjir dari sungai Celeng. <b>(S21)</b> 3. Penguatan kelembagaan dan kemampuan masyarakat kapanewon dalam upaya penanganan korban bencana alam yang cepat dan responsif melalui pembinaan FPRB, Karang Taruna, TP.PKK Kalurahan sampai tingkat dasawisma. <b>(S22)</b>	Penguatan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum untuk penyelenggaraan trantibum dan penanganan bencana terpadu dan berkesinambungan bersama muspikap, FPRB, Linmas dan RAPI. <b>(S19)</b>
1. Peningkatan Koordinasi intensif Kapanewon dengan Pamong Kalurahan dan Padukuhan <b>(S17)</b> 2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang intensif dan berorientasi pada terciptanya stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah Kapanewon Dlingo <b>(S23)</b>	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang intensif yang berorientasi pada terciptanya stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum <b>(S23)</b>
1. Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan. <b>(S20)</b>	Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan <b>(S20)</b>

Tabel 5.3  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah Dlingo

<b>VISI :</b>			
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika”			
<b>MISI ke 1 :</b>			
Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima			
<b>Tujuan PD</b>	<b>Sasaran PD</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas dan jangkauan	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik berbasis IT yang	- Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kapanewon bersama

<b>Tujuan PD</b>	<b>Sasaran PD</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
	<p>elayanan Kapanewon</p>	<p>berorientasi pada jangkauan pelayanan dan kepuasan masyarakat</p>	<p>muspikap dan Kalurahan secara intensif.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kinerja pelayanan prima kepada masyarakat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Panewu yang berkualitas.</li> </ul>
		<p>Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kalurahan untuk Peningkatan Produk Andalan Setempat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan koordinasi dengan kalurahan dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif masyarakat untuk ikut berperan serta dalam mewujudkan pembangunan masyarakat kalurahan yang maju dan mandiri melalui Forum Musrenbang baik di tingkat Kalurahan dan Kapanewon secara intensif</li> <li>- Mengoptimalkan Koordinasi Pemberdayaan Kalurahan yang berkelanjutan dan berkualitas dibidang sosial (pendidikan,kepemudaan dan olahraga, kesehatan, kebudayaan, keagamaan, dan kemiskinan) secara intensif</li> <li>- Mengoptimalkan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan secara intensif yang berorientasi pada pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pembinaan lingkungan hidup secara intensif.</li> </ul>
		<p>Penguatan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum untuk penyelenggaraan trantibum dan penanganan bencana terpadu dan berkesinambungan bersama muspikap, FPRB, Linmas dan RAPI.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum secara penanganan bencana secara intensif</li> <li>- Meningkatkan upaya penumbuhan rasa cinta tanah air dan rasa kebangsaan melalui pelaksanaan peringatan upacara HUT RI dan Hari-Hari Besar Nasional.</li> </ul>

Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang intensif yang berorientasi pada terciptanya stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah Kapanewon Dlingo</p>	<p>Mengoptimalkan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum yang berorientasi pada pembinaan wawasan kebangsaan dalam rangka memantapkan Pengamalan pancasila, UUD 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika, serta pemeliharaan keutuhan NKRI melalui fasilitasi pembinaan organisasi masyarakat secara intensif</p>
		<p>Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan</p>	<p>Menyusun perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di Kapanewon yang berkualitas</p> <p>Mengoptimalkan upaya implementasi Budaya Pemerintahan SATRIYA di Kapanewon secara intensif</p>

## **BAB VI.**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikator Kapanewon Dlingo disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kapanewon Dlingo  
Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Mewujudkan pelayanan yang prima dan bebas KKN di Kapanewon				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		88,03 angka	88,1 angka	88,4 angka	88,8 angka	89,1 angka	89,5 angka	89,5 angka									Kapanewon Dlingo
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon		90 angka	90 angka	90 angka	91 angka	91 angka	92 angka	92 angka									Kapanewon Dlingo

Tujuan	Sasaran	KODE				Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
										TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				TAR GET	Rp
										TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp				
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		4	0	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	n/a	100 persen	45.300.000	100 persen	66.040.000	100 persen	66.040.000	100 persen	66.040.000	100 persen	66.040.000	100 persen	309.460.000	jawatan praja	Kapanewon Dlingo
		4	0	0	0	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Tingkat penerapan budaya pemerintahan Satriya pada ASN di Kabupaten Bantul	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan Satriya ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	n/a	0 persen	-	82 persen	50.000.000	83 persen	50.000.000	84 persen	50.000.000	85 persen	50.000.000	85 persen	200.000.000	Sub Bagian Umum Sekretariat	Kapanewon Dlingo
		4	0	0	206	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Capaian kinerja dari sub kegiatan dibagi target subkegiatan dikalikan 100%		100 persen	45.300.000	100 persen	66.040.000	100 persen	66.040.000	100 persen	66.040.000	100 persen	66.040.000	100 persen	309.460.000	Jawatan Praja	Kapanewon Dlingo



Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp		
											TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA*	Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	80 angka	85 angka	2.860.837.984	86 angka	2.985.290.490	87 angka	3.156.095.490	88 angka	3.336.558.490	89 mangka	3.903.320.490	89 angka	#### #### ##	Kapanewon Dlingo		
		7	01	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	79 Angka	100 persen	8.500.000	100 persen	15.000.000	100 persen	20.000.000	100 persen	25.000.000	100 persen	35.000.000	100 persen	103.500.000	Sub Bagian Program Keuangan	Kapanewon Dlingo	
		7	01	01	201		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	5 dokumen	6 dokumen	4.250.000	6 dokumen	10.000.000	6 dokumen	10.000.000	6 dokumen	10.000.000	6 dokumen	20.000.000	30 dokumen	54.250.000			
		7	01	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen hasil Evaluasi Dokumen Keuangan	7 dokumen 37 dokumen	6 dokumen 22 dokumen	4.250.000 4.250.000	4 dokumen 28 dokumen	5.000.000 5.000.000	4 dokumen 28 dokumen	10.000.000 10.000.000	4 dokumen 28 dokumen	15.000.000 15.000.000	4 dokumen 28 dokumen	15.000.000 15.000.000	20 dokumen 134 dokumen	49.250.000 49.250.000			

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp		
											TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		7	01	01	202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadministrasian keuangan perangkat daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	85 angka	2.338.070.484	80 angka	2.374.058.490	80 angka	2.401.095.490	80 angka	2.444.319.490	80 angka	2.515.394.490	80 angka	#### ### ##	Sub Bagian Umum dan Kepegawain	Kapanewon Dlingo	
		7	01	01	202	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan Tunjangan ASN		14 kali	14 kali	1.501.559.994	14 kali	1.509.368.000	14 kali	1.531.405.000	14 kali	1.549.629.000	14 kali	1.570.704.000	70 kali	7.662.665.994	Sub Bagian Umum dan Kepegawain		
		7	01	01	202	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran TPP		12 kali	12 kali	794.690.490	12 kali	794.690.490	12 kali	794.690.490	12 kali	794.690.490	12 kali	794.690.490	60 kali	3.973.452.450	Sub Bagian Umum dan Kepegawain		
		7	01	01	202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium pengelola keuangan, BMD dan kepegawaian		108 orang bulan	108 ob	41.820.000	144 ob	70.000.000	144 ob	75.000.000	144 ob	100.000.000	144 ob	150.000.000	684 ob	436.820.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawain		
		7	01	01	206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	80 angka	100 persen	165.881.734	100 persen	194.750.000	100 persen	230.000.000	100 persen	280.000.000	100 persen	410.000.000	100 persen	1.280.631.734	Sub bagian Umum dan Kepegawain		
		7	01	01	206	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik		12 bulan	6 jenis	10.583.000	8 jenis	15.000.000	9 jenis	20.000.000	9 jenis	25.000.000	10 jenis	50.000.000	10 jenis	120.583.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawain		

Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp			
							TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp			
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		7	010206	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Listrik Kantor	15 jenis	13 jenis	21.344.234	14 jenis	25.000.000	15 jenis	30.000.000	16 jenis	35.000.000	17 jenis	55.000.000	17 jenis	166.344.234			
		7	010606	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan	10 jenis	8 jenis	13.770.000	10 jenis	13.000.000	11 jenis	20.000.000	11 jenis	25.000.000	12 jenis	45.000.000	12 jenis	116.770.000			
		7	010605	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan	4 jenis	3 jenis	30.000 lembar	3 jenis	10.000.000	3 jenis	15.000.000	3 jenis	20.000.000	3 jenis	45.000.000	3 jenis	100.532.000			
				Penggandaan		30.000 lembar	30.000 lembar		30.500 lembar		31.000 lembar		31.500 lembar		153.000 lembar						
		7	010606	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar	3 jenis	1 jenis	2.400.000	1 jenis	2.500.000	1 jenis	5.000.000	1 jenis	5.000.000	1 jenis	10.000.000	1 jenis	24.900.000			
		7	010609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat	22 dokumen	40 dokumen	103.002.500	40 dokumen	125.000.000	40 dokumen	130.000.000	40 dokumen	160.000.000	40 dokumen	190.000.000	200 dokumen	708.002.500			
				Perjalanan dinas dalam daerah	340 op	300 op	300 op		300 op		300 op		300 op		300 op		300 op		1500 op		
				Perjalanan dinas luar daerah	0 op	5 op	5 op		5 op		5 op		5 op		5 op		25 op				
		7	010600	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan penataan arsip	0	2 dokumen	4.250.000	2 dokumen	4.250.000	2 dokumen	10.000.000	2 dokumen	10.000.000	2 dokumen	15.000.000	10 dokumen	43.500.000			

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp		
											TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		7	0	0	2	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	100 persen	17.000.000	100 persen	40.000.000	100 persen	70.000.000	100 persen	85.000.000	100 persen	95.000.000	100 persen	307.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Dlingo
		7	0	0	2	0	Pengadaan Mebel	Pengadaan mebel		1 jenis	1 jenis	8.000.000	2 jenis	20.000.000	2 jenis	30.000.000	3 jenis	35.000.000	3 jenis	50.000.000	3 jenis	143.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		7	0	0	2	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pengadaan peralatan dan mesin lainnya		2 jenis	1 jenis	9.000.000	2 jenis	20.000.000	2 jenis	40.000.000	3 jenis	50.000.000	3 jenis	45.000.000	3 jenis	164.000.000		
		7	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	80 angka	100 persen	188.128.036	100 persen	210.000.000	100 persen	260.000.000	100 persen	295.000.000	100 persen	390.000.000	100 persen	1.343.128.036	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Dlingo
		7	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai		570 lembar	400 lembar	4.000.000	420 lembar	5.000.000	430 lembar	10.000.000	450 lembar	15.000.000	460 lembar	25.000.000	2160 lembar	59.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		7	0	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran rekening air		12 bulan	12 bulan	56,200.000	12 bulan	60,000.000	12 bulan	80,000.000	12 bulan	85.000.000	12 bulan	110.000.000	60 bulan	391.200.000		
								Pembayaran rekening listrik		12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		60 bulan							
							Pembayaran rekening telephon		12 bulan	12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		60 bulan				

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp		
											TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		7	01	01	208	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor		4 kali	2 jenis	11.780.000	3 jenis	15.000.000	4 jenis	20.000.000	4 jenis	25.000.000	4 jenis	45.000.000	4 jenis	116.780.000		
		7	01	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan keamanan dan ketertiban kantor		24 ob	2 dokumen	116.148.036	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	10 dokumen	776.148.036							
							Laporan kebersihan lingkungan kantor		12 ob	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	5 dokumen								
							Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon		24 ob	2 dokumen	2 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	10 dokumen								
							Laporan kegiatan administrasi umum kapanewon			0 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	4 dokumen								
							Dokumen BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan tenaga Non ASN		60 ob	60 ob	60 ob		60 ob	60 ob	60 ob	300 ob								
		7	01	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	100 persen	143.257.730	100 persen	151.482.000	100 persen	175.000.000	100 persen	207.239.000	100 persen	457.926.000	100 persen	1.134.904.730	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kapanewon Dlingo

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp		
											TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		7	01	01	20	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4, pajak kendaraan	1 unit	1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		5 unit				
		7	01	01	20	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	1 unit	2 unit	17.138.330	2 unit	20.000.000	2 unit	25.000.000	2 unit	50.000.000	2 unit	277.926.000	10 unit	390.064.330			
		7	#	#	20	01	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	90 persen	100 persen	31.995.000	100 persen	45.000.000	100 persen	90.000.000	100 persen	110.000.000	100 persen	145.000.000	100 persen	421.995.000			Kapanewon Dlingo
		7	01	02	20	01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	95 persen	100 persen	24.000.000	100 persen	35.000.000	100 persen	60.000.000	100 persen	75.000.000	100 persen	95.000.000	100 persen	289.000.000	jawatan Praja	Kapanewon Dlingo	

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp		
											TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		7	01	02	201	01	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan koordinasi forkompinkap		6 dokumen	4 Dokumen	9.875.000	4 Dokumen	15.000.000	4 Dokumen	20.000.000	4 Dokumen	25.000.000	4 Dokumen	35.000.000	20 Dokumen	104.875.000		
		7	01	02	201	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan		6 dokumen	6 Dokumen	14.125.000	6 Dokumen	20.000.000	6 Dokumen	40.000.000	6 Dokumen	50.000.000	6 Dokumen	60.000.000	30 Dokumen	184.125.000		
		7	01	02	204		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Capaian kinerja pelayanan kapanewon</b>	<b>Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%</b>	<b>90 angka</b>	<b>85 angka</b>	<b>7.995.000</b>	<b>86 angka</b>	<b>10.000.000</b>	<b>87 angka</b>	<b>30.000.000</b>	<b>88 angka</b>	<b>35.000.000</b>	<b>89 angka</b>	<b>50.000.000</b>	<b>90 angka</b>	<b>132.995.000</b>	<b>jawatan Pelayanan</b>	<b>Kapanewon Dlingo</b>
		7	01	02	204	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Laporan survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		0	2 Dokumen	7.995.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	35.000.000	2 Dokumen	50.000.000	10 Dokumen	132.995.000		
							Masyarakat yang dilayani			4000 orang	5280 orang		5280 orang			5280 orang		5280 orang		5280 orang	26400 orang			
							Jenis Layanan yang diberikan			14 jenis			14 jenis			14 jenis		14 jenis		14 jenis				

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp		
											TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		7	013				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%)) /2	85 persen	100 persen	138.447.500	100 persen	170.000.000	100 persen	210.000.000	100 persen	240.000.000	100 persen	245.000.000	100 persen	1.003.447.500	Kapanewon Dlingo	
		7	013	201			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	85 persen	100 persen	88.367.500	100 persen	100.000.000	100 persen	130.000.000	100 persen	160.000.000	100 persen	145.000.000	100 persen	623.367.500	Jawatan Kemakmuran	Kapanewon Dlingo
		7	013	201			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Berita Acara penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif		2 dokumen	1 dokumen	18.530.000	2 dokumen	20.000.000	2 dokumen	40.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	35.000.000	9 dokumen	163.530.000		
		7	013	201			monev pedukuhan			0	6 Dokumen		8 Dokumen		10 Dokumen		12 Dokumen		14 Dokumen		50 Dokumen			

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026				TAR GET	Rp
											TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		7	0	0	2	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan Bidang Sosial		10 dokumen	32 dokumen	69.837.500	32 dokumen	80.000.000	32 dokumen	90.000.000	32 dokumen	110.000.000	32 dokumen	110.000.000	160 dokumen	459.837.500		
		7	0	0	2	0	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	100 persen	50.080.000	100 persen	70.000.000	100 persen	80.000.000	100 persen	80.000.000	100 persen	100.000.000	100 persen	380.080.000	Jawatan Kemakmuran	Kapanewon Dlingo
		7	0	0	2	0	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat		8 dokumen	5 dokumen	50.080.000	5 dokumen	70.000.000	5 dokumen	80.000.000	5 dokumen	80.000.000	5 dokumen	100.000.000	25 dokumen	380.080.000		
		7	0	0			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)* 100%	100 persen	100 persen	104.587.000	100 persen	120.000.000	100 persen	120.000.000	100 persen	170.000.000	100 persen	180.000.000	100 persen	694.587.000		Kapanewon Dlingo

Tujuan	Sasaran	KODE					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp		
											TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp				
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		7	01	04	201	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%		100 Persen	104.587.000	100 Persen	120.000.000	100 Persen	120.000.000	100 Persen	170.000.000	100 Persen	180.000.000	100 Persen	694.587.000	Jawatan Keamanan	Kapanewon Dlingo	
		7	01	04	201	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan penanggulangan bencana Laporan kejadian trantibum di kapanewon laporan pelaksanaan upacara hari besar		2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	4 dokumen	12 dokumen	2 dokumen	4 dokumen	12 dokumen	2 dokumen	4 dokumen	12 dokumen	10 dokumen	20 dokumen	60 dokumen	694.587.000	Kapanewon Dlingo
		7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum	Cakupan Wilayah Pelayanan	100 persen	100 persen	10.980.000	100 persen	20.000.000	100 persen	38.710.000	100 persen	35.000.000	100 persen	35.000.000	100 persen	129.690.000		Kapanewon Dlingo	



Tujuan	Sasaran	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Kinerja Tahun 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TAR GET	Rp			
							TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp	TAR GET	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
<b>JUMLAH</b>							<b>3.192.147.484</b>	<b>3.456.330.490</b>	<b>3.730.845.490</b>	<b>4.007.598.490</b>	<b>4.624.360.490</b>	<b>19.001.282.444</b>									

Keterangan: \*) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji dan tunjangan ASN serta TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM.

## BAB VII.

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kapanewon Dlingo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Dlingo dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2022-2026. Indikator kinerja Kapanewon Dlingo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun Baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>A</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03 angka	88,1 angka	88,4 angka	88,8 angka	89,1 angka	89,5 angka	89,5 angka	
<b>B</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	90 angka	90 angka	90 angka	91 angka	91 angka	92 angka	92 angka	
<b>1</b>	<b>Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas</b>	n/a	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	Jawatan Praja
	<b>Tingkat penerapan budayapemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul</b>	n/a	-	<b>82 persen</b>	<b>83 persen</b>	<b>84 persen</b>	<b>85 persen</b>	<b>85 persen</b>	Sub Bagian Umum Sekretariat
1.1	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jawatan Praja
1.2	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	n/a	-	100 persen	Sub Bagian Umum Sekretariat				
<b>2</b>	<b>Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</b>	<b>90 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	jawatan Pelayanan dan jawatan Praja
2.1	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kapanewon	95 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	jawatan Pelayanan
2.2	Capaian Kinerja Pelayanan Kapanewon	90 angka	85 angka	86 angka	87 angka	88 angka	89 angka	89 angka	jawatan Pelayanan
<b>3</b>	<b>Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat</b>	<b>85 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>Jawatan Kemakmuran</b>



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Perangkat Daerah atau yang disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang merumuskan strategi dan arah kebijakan sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Kapanewon Dlingo periode 2021-2026, mengemukakan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Kapanewon pada periode Renstra 2016-2021.

Dari hasil evaluasi periode Renstra sebelumnya, diperoleh data kekuatan sebagai faktor pendorong serta kelemahan sebagai penghambat dalam pelaksanaan tugas Kapanewon Dlingo, yang dirumuskan dengan pertimbangan ancaman dan peluang yang dimiliki, sehingga memperoleh strategi dan arah kebijakan yang relevan, serta sesuai dengan kondisi terkini dan visi misi kepala daerah terpilih.

Untuk mendapatkan rencana pembangunan kewilayahan Kapanewon Dlingo yang sinergi dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Pemerintah Kabupaten Bantul, maka program, kegiatan serta sub kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2021-2026 harus berpedoman pada dokumen Renstra Kapanewon Dlingo periode 2021-2026. Maka kaidah pelaksanaan Renstra PD yaitu :

- a. Seluruh aparaturnya melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026.
- c. Kepala perangkat daerah bersama seluruh aparaturnya melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik

Renstra Pembangunan Kapanewon Dlingo disusun sebagai acuan, dan pedoman bagi semua Aparat Pemerintah Kapanewon Dlingo bersama masyarakat dan stakeholders, dalam menyelenggarakan pembangunan kewilayahan periode tahun 2022-2026 sesuai target sasaran Renstra.

Kondisi yang dinamis, memungkinkan dilakukan evaluasi dokumen Renstra oleh Panewu bersama seluruh aparaturnya Kapanewon Dlingo,

berdasarkan data evaluasi terhadap hasil Renja Kapanewon Dlingo secara periodik.

Demikian dokumen ini disusun untuk dapat menjadi acuan dan pedoman arah kebijakan serta anggaran periode 2021-2026 Kapanewon Dlingo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Bantul,       September 2021  
Panewu,

.....